

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berkembangnya kompleksitas industri usaha yang bertambah luas, maka tindak kriminalitas dengan bentuk kecurangan atau dikenal sebagai *fraud* semakin berkembang pula. Kecurangan merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang di sengaja dengan maksud mengambil harta atau hak pihak atau kelompok lain. *Fraud* terjadi di berbagai sektor, mencakup sektor pemerintah dan sektor swasta. Pada sektor pemerintah kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999, tentang “penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme” mendefinisikan bahwa korupsi merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana. *Corruption perceptions index* (CPI) memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara telah di rusak oleh korupsi. Hal ini di tandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pimpinan dan pejabat tinggi,” kata Joze ugaz, ketua *transparency international* in Berlin. Berdasarkan *corruption perceptions index* (CPI) dalam *transparency international* pada tahun 2014 korupsi di Indonesia memiliki skor 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang di ukur. Skor CPI Indonesia naik 2 poin dari tahun 2013 yang memiliki skor 32.

Pada tahun 2015, survei persepsi korupsi dilakukan di 11 (sebelas) kota di Indonesia. Sebelas kota tersebut adalah kota Pekanbaru, kota Semarang, kota

Banjarmasin, kota Pontianak, kota Makassar, kota Manado, kota Medan, kota Padang, kota Bandung, kota Surabaya, dan kota Jakarta. Dari survei tersebut diperoleh hasil bahwa kota yang memiliki skor tertinggi dalam indeks persepsi korupsi 2015 adalah kota Banjarmasin dengan skor 68, kota Surabaya dengan skor 65, dan kota Semarang dengan skor 60. Sementara itu, kota yang memiliki skor indeks persepsi korupsi terendah adalah kota Bandung dengan skor 39, kota Pekanbaru dengan skor 42, dan kota Makassar dengan skor 48.

Menurut *anti corruption committee* (ACC), Semarang merupakan salah satu kota yang rawan korupsi, hal ini berlandaskan data dari infokorupsi.com bahwa terdapat beberapa kasus yang terjadi di kota Semarang, kasusnya di antara lain yakni korupsi program pengelolaan ruang terbuka hijau 2012 yang melibatkan kepala bidang peternakan dinas pertanian kota Semarang senilai Rp. 1,2 miliar, kasus lain yaitu korupsi dana hibah kota Semarang 2012-2013 senilai Rp. 1,5 miliar, dan yang terbaru adalah kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) dengan merugikan uang negara sekitar Rp. 654 juta.

Maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia mengakibatkan adanya kecenderungan kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintah, dengan melibatkan instansi dari tingkatan pusat maupun daerah, yang pelakunya merupakan pihak dalam maupun luar organisasi. Ketika melakukan kecurangan dalam organisasi, setiap pelaku mempunyai motivasi yang beraneka macam, misal motivasi individu melakukan kecurangan yaitu untuk mendapatkan keuntungan individu (Albrecht, 2014 dalam Prawira dkk, 2014) pada saat individu menganggap bahwa keadilan di dalam organisasi kurang sesuai. Adapun teori yang menyatakan

tiga faktor penyebab kecurangan (*fraud*) seseorang yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) serta rasionalisasi (*rasionalization*).

Kecurangan yang terjadi baik dalam lingkup swasta maupun pemerintah dipengaruhi oleh besar kecilnya tekanan (*pressure*) yang ada, baik tekanan keuangan maupun nonkeuangan, serta tekanan yang muncul dari diri sendiri maupun tekanan dari organisasi. Faktor utama yang menyebabkan tekanan adalah belum terwujudnya keadilan dari segi kompensasi. Kompensasi yaitu suatu imbalan balik yang diterima sehubungan dengan dilakukannya pekerjaan. Tujuan manajemen memberikan kompensasi adalah membantu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan keberhasilan dengan menerapkan strategi-strategi perusahaan atau organisasi serta menjamin terciptanya keadilan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Keadilan yang menekankan bagaimana kompensasi berupa promosi, gaji dan tunjangan di alokasikan dengan adil dan proporsional. Jika kompensasi tidak dialokasikan secara memadai dari hasil pekerjaan seseorang atau pegawai maka akan berakibat terjadinya ketidakpuasan kerja, hal tersebut akan menimbulkan sikap mangkir bahkan kecurangan yang merugikan perkembangan organisasi.

Pada penelitian yang dilakukan Mustikasari (2013) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Dan penelitian Sari dkk (2015) menunjukkan bahwa persepsi kesesuaian kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan (*fraud*) pada SKPD di kabupaten Tabanan.

Selain sisi tekanan, kecuranganpun bisa dipengaruhi berdasarkan ada tidaknya kesempatan (*opportunity*), kesempatan besar menjadikan kecurangan akan sering terjadi. Untuk menangani masalah tersebut, maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yakni sistem yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemimpin dan seluruh tenaga kerja untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan institusi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan asset negara dan ketaatan, keandalan pelaporan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pengendalian internal terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Ketika pengendalian internal tidak berjalan secara efektif, maka berakibat pada akses seseorang untuk melakukan kecurangan mudah terjadi, maka akan berdampak buruk dalam organisasi perusahaan. Oleh sebab itu, perlu adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik melalui peningkatan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, agar organisasi dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan bahkan kecurangan (*fraud*).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prawira dkk (2014) bahwa efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi. Namun, penelitian Mustikasari (2013) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* di

sektor pemerintah, dan penelitian Pristiyantri (2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* disektor pemerintah.

Selain kedua faktor diatas yaitu keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal yang dapat mempengaruhi terjadinya *fraud*, rasionalisasi (*rationalization*) yang mempertimbangkan perilaku pelaku kecurangan dengan memproksikan etika organisasi pemerintah dan komitmen organisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi *fraud* dapat terjadi, karena individu atau kelompok akan cenderung untuk menyimpang dari peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadikan etika dan komitmen organisasi tidak akan terbentuk secara baik, bersih, dan berwibawa.

Suatu etika memainkan peran penting dalam kehidupan organisasi, baik sektor swasta maupun pemerintah. Etika (*ethics*) dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku, prinsip atau nilai moral yang mengatur individu maupun kelompok. Etika pada organisasi akan tumbuh dan berkembang searah dengan berkembangnya hidup organisasi, karena etika sangat diperlukan dalam suatu organisasi agar organisasi tersebut dapat berfungsi secara baik dan teratur. Namun, saat ini banyak kasus yang muncul berkaitan dengan penyalahgunaan etika, salah satu bukti adalah kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan yang akan merugikan keuangan negara. Sehingga pegawai bahkan masyarakat luas diwajibkan berperilaku berdasarkan kode etik.

Pada penelitian Fitria dan Amilin (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara lingkungan etika organisasi terhadap potensi terjadinya *fraud*. Namun, penelitian Noviriantini dkk (2015) menunjukkan bahwa terdapat

pengaruh negatif moralitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten Jembrana.

Ketika etika telah diterapkan dalam lingkungan organisasi, individu perlu memiliki komitmen. Komitmen merupakan sesuatu yang penting. Individu yang bergabung pada sebuah organisasi akan dituntut adanya komitmen dari dalam dirinya. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampaimana karyawan dalam memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins, 2012:100). Komitmen organisasi memiliki tiga komponen yaitu keyakinan yang kuat dari individu untuk menerima tujuan organisasi, kemauan individu untuk bekerja keras bergantung pada organisasi, dan keinginan individu yang terbatas untuk mempertahankan keanggotaan.

Suatu komitmen organisasi umumnya mengacu pada sikap dan perasaan karyawan. Oleh sebab itu, organisasi akan melakukan berbagai cara agar karyawan tetap memihak terhadap organisasi tertentu dengan tujuan untuk mempertahankan keanggotaannya. Semakin tinggi komitmen organisasi, maka semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* disektor pemerintah (Pristiyanti, 2012).

Pristiyanti (2012) pada penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa berpengaruh negatif diantara komitmen organisasi terhadap kecurangan disektor pemerintah. Dan Mustikasari (2013) juga menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan disektor pemerintah.

Berdasarkan pada pengkajian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan dari beberapa hasil penelitian atau terdapat *research gap*. Hal

ini memungkinkan adanya penelitian yang sama mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali dengan mengembangkan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini yakni replikasi atas penelitian Sulastri dan Simanjuntak (2014) berjudul *Fraud pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal dan Etika Organisasi Pemerintah*. Dimana perbedaannya adalah : (1) peneliti menambahkan variabel komitmen organisasi yang belum terdapat pada penelitian sebelumnya, (2) peneliti menggunakan periode pengamatan yang terbaru yaitu tahun 2015-2016, (3) tempat penelitian berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di pemerintah kota Semarang, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di pemerintah DKI Jakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menunjukkan *research gap* pada variabel etika organisasi pemerintah, sistem pengendalian internal, keadilan kompensasi serta komitmen organisasi atas *fraud* disektor pemerintah. *Research gap* tersebut menjadi alasan utama untuk mengembangkan lebih lanjut tentang faktor apa saja yang berdampak kecurangan disektor pemerintah. Sehingga, pengkajian ini dimaksudkan untuk menguji kembali validitas antara variabel independen dan variabel dependen tersebut dari tahun ke tahun.

Fraud (kecurangan) selalu menjadi masalah utama pada sektor pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pada pemerintah pusat maupun daerah kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi, dimana para pemimpin dan pejabat

tinggi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang telah diberikan. Terkait dengan persoalan tersebut. Sistem pengendalian internal, etika organisasi pemerintah, keadilan kompensasi dan komitmen organisasi menjadi faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* pada sektor pemerintah. Faktor keadilan kompensasi disebabkan karena adanya tekanan dari segi kompensasi yang belum terwujud secara memadai, baik dari segi keuangan maupun non keuangan. Faktor sistem pengendalian internal terjadi akibat ada tidaknya kesempatan, dengan adanya kesempatan yang besar menjadikan kecurangan lebih sering terjadi. Selain faktor keadilan kompensasi dan sistem pengendalian internal, rasionalisasi yang mempertimbangkan perilaku pelaku kecurangan dengan melibatkan faktor etika organisasi pemerintah dan komitmen organisasi juga menjadi faktor terjadinya *fraud*, karena keduanya menganalisis dan menerapkan suatu sikap, nilai, prinsip serta perasaan pegawai terhadap organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diteliti antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh variabel keadilan kompensasi terhadap *fraud* disektor pemerintah ?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap *fraud* disektor pemerintah ?
3. Apakah terdapat pengaruh variabel etika organisasi pemerintah terhadap *fraud* disektor pemerintah ?
4. Apakah terdapat pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap *fraud* disektor pemerintah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh variabel keadilan kompensasi terhadap *fraud* disektor pemerintah.
2. Menganalisis pengaruh variabel sistem pengendalian internal terhadap *fraud* disektor pemerintah.
3. Menganalisis pengaruh variabel etika organisasi pemerintah terhadap *fraud* disektor pemerintah.
4. Menganalisis pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap *fraud* disektor pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian di atas, yakni :

1. Penelitian sekarang diharapkan dapat menyediakan laporan serta sarana untuk menambah ilmu pemahaman tentang bagaimana pentingnya pengaruh faktor etika organisasi pemerintah, sistem pengendalian internal, keadilan kompensasi serta komitmen organisasi atas *fraud* disektor pemerintah.
2. Penelitian sekarang diharapkan mampu memberikan peran dalam perbaikan serta perubahan yang baik pada instansi dimana peneliti melakukan penelitian.
3. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk melakukan survei dipenelitian mendatang.